



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran III

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan Pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Dan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan awal renja PD sebagai persiapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.

Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis yang menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat yaitu tuntutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

28. Peraturan Wali Kota Nomor 12 tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk mengarahkan pelayanan Inspektorat Daerah khususnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah untuk :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
- 3. Tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah sebagai pedoman pencapaian program RPJMD selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
- 4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah tahun 2027 yang di lengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renja Perangkat Daerah.
- 1.2. Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun dengan kaidah produk hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027.
- 1.4. Sistematika Penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah;

- 2.3. Rumusan permasalahan dan Isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan Evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 dan kondisi lingkungan dinamis
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5. Inovasi bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daeah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 membutuhkan Analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025
- 3.2. Arah Kebijakan yang sudah di selaraskan dengan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029, RKPD 2027, RKPD Tahun 2027 dan kebijakan Nasional / daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinefrja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target Nasional, pencapaian SPM, Program Strategis Nasioanl (ProSN) tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal khusus lainnya.

BAB V Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tashun 2027 yang di dasarkan pada Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja PD Tahun 2025
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang di dasarkan pada Renstra PD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja PD Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian visi dan misi, sehingga dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.301.044.148,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.037.354.125,- atau 86.41% Anggaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan serta 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 3 (tiga) program utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini Dengan total pagu tahun 2025 Rp. 8.195.398.248,- dengan realisasi tahun 2025 Rp. 7.516.454.125,- atau 91,71 % melalui kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2025 Rp. 229.096.900,- dengan realisasi tahun 2025 Rp. 27.428.000,- atau 11,97% melalui kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
Program ini dengan total pagu anggaran tahun 2025 Rp. 876.549.000,- dengan realisasi tahun 2025 Rp.493.472.000,- atau 56,29% melalui kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pendampingan dan Asistensi.

I. Realisasi Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan Inspektorat Tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- a. Input
 - Dana : 2.500.000,-
 - Realisasi : 1.940.000,- keu: 77,6% dan fisik : 100%
- b. Output :
 - . Jumlah laporan keuangan LKjIP, LKPj, LPPD, Renja, PPRG, Perjanjian Kinerja, Register Resiko RTP, IKM, POK, Forum OPD, PMPRB dan PMPZI Inspektorat Daerah yang di targetkan 11 dokumen dapat terealisasi.
- c. Outcome :
 - Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- a. Input
 - Dana : 6.295.037.380,-
 - Realisasi : 6.065.071.503,- Keu : 96,34% Fisik : 100%
- b. Output :
 - . Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Inspektorat yang di targetkan 40 orang dapat terealisasi
- c. Outcome :
 - Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- a. Input
 - Dana : 17.500.000,-
 - Realisasi : 17.280.000,- Keu : 98,74% Fisik :100%

b. Output :

- . Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang ditargetkan 12 bulan dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

a. Input

Dana : 22.500.000,-
Realisasi : 15.090.000,- Keu : 67,06 Fisik : 100%

b. Output :

- . Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (asuransi kendaraan dinas roda 4) yang ditargetkan 1 dokumen dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlindunginya kendaraan dinas roda 4 yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai

a. Input

Dana : 5.000.000,-
Realisasi : 4.110.000,- Keu : 82,2 % Fisik : 100%

b. Output :

- . Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang ditargetkan 1 dokumen dapat terealisasi

c. Outcome :

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang ditargetkan 42 orang dapat terealisasi

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a. Input

Dana : 377.000.000,-
Realisasi : 331.487.005,- Keu: 87,92 % Fisik:100%

b. Output :

- . ✓ Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (PKS dan peningkatan kapabilitas APiP) yang ditargetkan 42 orang dapat terealisasi.

- c. Outcome :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawasan yang di targetkan 42 orang dapat terealisasi

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1 **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

- a. Input
Dana : 8.000.000,-
Realisasi : 7.834.500,- Keu :97,93% Fisik :100%
- b Output :
 - . Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan yang di targetkan 6 paket dapat terealisasi.
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

1.5.2 **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

- a. Input
Dana : 14.006.400,-
Realisasi : 13.684.000,- Keu : 97,69% Fisik : 100%
- b Output :
 - . Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan 12 paket dapat terealisasi
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.5.3 **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

- a. Input
Dana : 55.000.000,-
Realisasi : 49.776.750,- Keu : 90,50% Fisik : 100%
- b Output :
 - . Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan 12 paket dapat terealisasi
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.5.4 **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

- a. Input
Dana : 25.000.000,-
Realisasi : 19.328.900,- Keu : 77,31% Fisik : 100%
- b Output :
 - . Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan 24 paket dapat terealisasi

- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Input
Dana : 3.102.000,-
Realisasi : 2.970.000,- Keu : 95,74 % Fisik : 100%
- b. Output :
. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yang ditargetkan 12 dokumen dapat terealisasi
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

- a. Input
Dana : 15.000.000,-
Realisasi : 6.131.000,- Keu : 40,87% Fisik : 100%
- b. Output :
. Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang disediakan yang ditargetkan 12 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- a. Input
Dana : 468.586.552,-
Realisasi : 221.464.164,- Keu : 47,26% Fisik : 100%
- b. Output :
. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang di targetkan 120 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- a. Input
Dana : 74.383.700.-
Realisasi : 72.134.395,- Keu : 96, 97% Fisik : 100%
- b. Output :
.

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang di targetkan 12 unit dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Input

Dana : 2.500.000,-

Realisasi : 1.649.000,- Keu : 65,96 % Fisik : 100%

b. Output :

. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (perangko, materai dan jasa pengiriman surat) yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Input

Dana : 45.707.016,-

Realisasi : 31.381.386,- Keu : 68,65% Fisik : 100%

b. Output :

. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan yang ditargetkan 12 bulan dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Input

Dana : 18.000.000,-

Realisasi : 11.000.000,- Keu : 61,11 % Fisik : 100%

b. Output :

. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan di targetkan 12 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi.

1.7.4 **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

a. Input

Dana : 192.000.000,-

Realisasi : 171.310.114,- Keu : 89,22% Fisik : 100%

b Output :

- . Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jasa tenaga administrasi 2 orang, tenaga kebersihan 1 orang dan tenaga administrasi kearsipan 3 orang) yang disediakan di targetkan 12 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatkan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang targetkan 1 tahun dapat terealisasi

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.8.1 **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

a. Input

Dana : 38.000.000,-

Realisasi : 21.418.000,- Keu : 56,36% Fisik : 100%

b Output :

- . Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara (1 unit roda 4) yang di targetkan 1 unit dapat terealisasi

c. Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

1.8.2 **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

a. Input

Dana : 203.754.900,-

Realisasi : 160.153.408,- Keu : 78,60% Fisik : 100%

b Output :

- . Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya yang dipelihara (9 unit roda 4 dan 9 unit roda 2) yang ditargetkan 18 unit dapat terealisasi

- c. Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

1.8.3 **Pemeliharaan Mebel**

- a. Input
Dana : 6.000.000,-
Realisasi : 6.000.000,- Keu : 100% Fisik : 100%
- b. Output :
 - . Jumlah mebel yang dipelihara yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi
- c. Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

1.8.4 **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

- a. Input
Dana : 40.000.000,-
Realisasi : 38.772.500,- Keu : 96,93% Fisik : 100%
- b. Output :
 - . Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang ditargetkan 39 unit dapat terealisasi
- c. Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

1.8.5 **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

- a. Input
Dana : 264.816.300,-
Realisasi : 244.477.500,- Keu : 92,31 % Fisik : 100%
- b. Output :
 - . Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi
- c. Outcome :
Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

1.8.6 **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya**

- a. Input

Dana : 2.004.000,-

Realisasi : 1.990.000,- Keu : 14 % Fisik : 100%

b. Output :

- . Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (gorden, taplak meja, karpet) yang ditargetkan 1 unit dapat terealisasi

c. Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pengawasan yang ditarget 1 tahun dapat terealisasi

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

a. Input

Dana : 7.667.800,-

Realisasi : 1.479.000,- Keu : 19,28% Fisik : 95%

b. Output :

- . Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah yang ditargetkan 45 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Input

Dana : 12.739.000,-

Realisasi : 370.000,- Keu : 2,904 % Fisik : 95%

b. Output :

- . Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah yang ditargetkan 30 laporan dapat terealisasi

c. Outcome :

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

2.1.3 Reviu Laporan Kinerja

a. Input

Dana : 9.222.900,-

Realisasi : 1.359.000,- Keu : 14,73% Fisik : 95%

b. Output :

- . Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang ditargetkan 5 laporan dapat terealisasi

- c. Outcome :
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

2.1.4 **Reviu Laporan Keuangan**

- a. Input
Dana : 14.611.000,-
Realisasi : 3.994.000,- Keu : 27,33% Fisik : 95%
- b. Output :
. Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan yang ditargetkan 40 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

2.1.5 **Kerjasama Pengawasan Internal**

- a. Input
Dana : 146.457.400,-
Realisasi : 10.340.000,- Keu: 7,06 % Fisik : 95%
- b. Output :
. Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk ditargetkan 1 kesepakatan dapat terealisasi, namun Audit TIK yang dianggarkan dengan pihak Eksternal tidak terlaksana karena akan persiapan pelaksanaan internal.
- c. Outcome :
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi.

2.1.6 **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

- a. Input
Dana : 14.802.800,-
Realisasi : 3.910.000,- Keu : 26,41 % Fisik : 95 %
- b. Output :
. Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- c. Outcome :
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

2.2.1 **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah**

- a. Input
Dana : 5.000.000,-
Realisasi : 4.055.000,- Keu : 81,1 % Fisik : 100%

- b. Output :
 - . Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara / Daerah yang ditangani yang di targetkan 1 laporan dapat terealisasi
- c. Outcome :
Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi

2.2.2 **Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**

- a. Input
 - Dana : 18.596.000,-
 - Realisasi : 1.921.000,- Keu : 10,33% Fisik : 90%
- b. Output :
 - . Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang di targetkan 10 laporan dapat terealisasi 5 laporan sesuai jumlah pengawasan tujuan yang dilaksanakan
- c. Outcome :
Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah dan pengawasannya dengan tujuan tertentu yang di target 1 tahun dapat terealisasi

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja sebagai berikut :

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

3.1.1 **Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan**

- a. Input
 - Dana : 2.500.000,-
 - Realisasi : 126.000,- Keu : 5,04 % Fisik : 95%
- b. Output :
 - . Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang di susun yang di targetkan 5 rekomendasi dapat terealisasi
- c. Outcome :
Tersedianya kebijakan teknis pengawasan yang di targetkan 1 tahun dapat terealisasi

3.2 Pendampingan dan Asistensi

3.2.1 **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Input
 - Dana : 142.233.000,-
 - Realisasi : 90.243.000,- Keu : 63.44% Fisik :100%
- b. Output :
 - .

Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di targetkan 5 rekomendasi dapat terealisasi

c. Outcome :

Terlaksananya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

a. Input

Dana : 30.170.000,-

Realisasi : 7.605.000,- Keu : 25,20 % Fisik : 100%

b Output :

. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi urusan Pemerintah Daerah yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

a. Input

Dana : 648.483.000,-

Realisasi : 364.555.500,- Keu : 56,21% Fisik :100

b Output :

. Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan korupsi yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

a. Input

Dana : 53.163.000,-

Realisasi : 30.942.500,- Keu : 58,20% Fisik : 100%

b Output :

. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang di targetkan 32 perangkat daerah dapat terealisasi

c. Outcome :

Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang bebas KKN, Akuntabel dan transparan yang ditargetkan 1 tahun dapat terealisasi

II. Faktor, Implikasi Target Kinerja dan Kebijakan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan adalah adanya rencana *time schedule*, pengintensifan pelaksanaan rapat dan koordinasi pada kegiatan dan sub kegiatan terkait sehingga pencapaian target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat tercapai sedangkan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Inspektorat Daerah atas pemenuhan target kinerja kegiatan adalah mendukung capaian kinerja perangkat daerah.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel T - C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja (Renja Inspektorat Daerah) dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kota Salatiga

[illegible]

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah							-	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	42	42	42	100.00	46	130	32.50
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42	42	42	42	100.00	42	126	31.50
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100.00	6	18	4.50
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	26	26	26	100.00	26	78	19.50
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	24	24	24	100.00	24	72	18.00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	120	120	120	100.00	120	360	90.00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	18	18	100.00	18	54	13.50
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	39	39	39	100.00	39	117	29.25
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	82	90.86	81	90.86	112.17	82	263.72	65.93
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	90	94.41	89	94.41	106.08	90	278.82	69.71
						Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP	75	87	60	87	145.00	75	249.00	62.25
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00

					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	48	48	48	100.00	48	144.00	36.00
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	100.00	26	78.00	19.50
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	4	4	4	100.00	4	12.00	3.00
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	9.00
					Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	1	1	100.00	1	3.00	0.75
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	4	4	100.00	4	12.00	3.00
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	1	1	1	100.00	1	3.00	0.75
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	10	10	5	50.00	10	25.00	6.25
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP Korsupgah KPK	86	94.58	84	90.30	107.50	86	271	67.72
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00

					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	5	5	5	100.00	5	15	3.75
					Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	7	7	7	100.00	7	21	5.25
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang Pengawasan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Realisasi capaian kinerja hasil QA SPIP Kota Salatiga pada tahun 2020 s.d 2024 telah berhasil di level 3, namun berdasarkan hasil laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 capaian Kota Salatiga mengalami penurunan menjadi 2,921 dan berada di level 2 penurunan ini menyebabkan perubahan atas hasil penilaian SPIP kota salatiga yang sebelumnya di level 3 (berkembang), dimana K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum

melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Sedangkan pada level 2 dimana K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Penurunan nilai QA SPIP Pemerintah Kota Salatiga perlu disikapi dengan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kota Salatiga dimana sebelumnya penilaian Maturitas SPIP Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, fokus pada lima unsur pengendalian intern (lingkungan, risiko, kegiatan, informasi, pemantauan) dan lebih fokus pada pemenuhan dokumen administratif (proses) namun sejak penerapan SPIP terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, yang merupakan penyempurnaan yang menggabungkan berbagai indikator kinerja tata Kelola dengan komponen maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP dan lebih fokus pada efektivitas hasil dari penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

2. **QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)**

Quality Assurance (QA) IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,973 tahun 2023 dengan capaian 2,800, tahun 2024 dengan capaian 2,802 dan capaian 2025 dengan capaian 2,910 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,910 (level 2) disebabkan belum adanya identifikasi risiko *fraud* dan kemitraan dan atas efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko belum dilakukan secara konsisten. Untuk mencapai perlu upaya pengendalian risiko korupsi dengan mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup 3 prinsip pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respon serta mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjuti pengaduan.

3. **QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)**

QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dimana realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 masih NA karna perhitungan indeks IEPK dimulai tahun 2022 dengan capaian 2,871, tahun 2023 dengan capaian 2,891, tahun 2024 dengan capaian 2,897 dan tahun 2025 dengan capaian 2,853 dimana capaian ini masih di level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan sehingga capaian kinerja level 3 dapat dicapai. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

4. **Kapabilitas APIP**

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan, yang ditunjang oleh dukungan pengawasan yang baik, sehingga menghasilkan pengawasan berkualitas dan mewujudkan perannya secara efektif capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024 dengan nilai capaian 3. namun berdasarkan laporan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Salatiga berada pada “Level terstruktur” dengan Skor “2,34” berada di level 2 penurunan ini menyebabkan perubahan atas hasil Kapabilitas APIP kota salatiga yang sebelumnya di level 3 (berkembang) yang menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Sedangkan pada level 2 (terstruktur) yang menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome

mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Salah satu penyebab penurunan capaian Kapabilitas APIP dikarenakan adanya perubahan kriteria penilaian dari BPKP yang semula ada 3 komponen, 6 elemen dan 18 topik menjadi 5 elemen dalam 23 topik. Penurunan nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Salatiga perlu disikapi dengan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan program penguatan pengawasan di Inspektorat dengan penguatan kendali mutu pengawasan di Inspektorat Daerah serta perbaikan dalam tata Kelola Pengawasan Inspektorat Daerah dengan melaksanakan evaluasi dan perbaikan dalam 5 elemen yang baru yaitu: kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan sumber daya serta budaya dan hubungan organisasi yang telah terbagi dalam 23 topik secara terperinci.

Capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut :

a. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern

Pengawasan Internal pemerintah daerah yang tertuang dalam LHP bertujuan memberikan jaminan kualitas (*Quality Assurance* / QA) bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengawasan internal di Kota Salatiga dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Itprov). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah dokumen yang memuat informasi tentang temuan-temuan dan rekomendasi menurut kriteria / standar pengawasan tertentu yang telah ditetapkan oleh pengawas. Hasil perhitungan laporan Tindak Lanjut Internal tahun 2025 di Kota Salatiga adalah 90,91%. Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kota Salatiga (83,38%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yaitu 81%, dengan persentase 112 %. Capaian persentase penyelesaian TLHP Internal tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan

capaian tahun 2024 adalah 90,86% (naik 0,05) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP yang terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pemeriksaan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yang dalam hal ini dilakukan oleh BPK yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah akurat dan mematuhi peraturan. Hasil opini Pengawasan BPK tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPK dengan 4 (empat) opini yang dapat diberikan yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penyelesaian rekomendasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Eksternal dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan dan dapat diterapkan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh jajarannya di internal OPD dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2025 adalah 94,74%. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 89% dengan persentase 106,44% Capaian persentase penyelesaian TLHP Eksternal (BPK) tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 adalah 94,41% (meningkat 0.33) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP BPK yang terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.

c. Nilai MCSP Korsupgah KPK

Monitoring *Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi dengan menggunakan platform dalam aplikasi Jaga.id yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan menilai upaya pencegahan

korupsi di pemerintah daerah. Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2025 dengan capaian 90,3 % mengalami penurunan dibandingkan hasil capaian pada periode tahun 2024 dengan hasil capaian 94,58% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 61 dari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 15 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yaitu 85% dengan persentase 106,23%.

d. Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. SAKIP merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan utama yang menjadi potret kinerja suatu instansi pemerintah. Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP adalah jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun terakhir dibagi total OPD. Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2024 dan 2025 adalah 90%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 28 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 3 OPD dari total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 60% dengan persentase 150%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Hasil Capaian Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota Salatiga semester 1 tahun 2024 adalah 80,08 dan semester 2 tahun 2024 adalah 80,61 dimana nilai rata-rata SKM Inspektorat Salatiga tahun 2024 sebesar 80,35 % mengalami penurunan 0,97 dibandingkan capaian tahun 2024 dengan capaian 81,58. Capaian ini di bawah target tahun 2025 yaitu 82 dengan persentase 97,98 % penurunan capaian IKM tahun 2025 ini dikarenakan adanya penurunan capaian dalam indikator Prosedur (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya / Tarif

(U4), Produk Layanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U8) atas hasil capaian nilai IKM tersebut perlu dilaksanakan evaluasi dan perbaikan internal dalam unsur-unsur pelayanan agar capaian tahun 2026 dapat meningkat sesuai target yang ditetapkan.

Pada pembahasan sub bab ini kami sajikan Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat dengan format tabel terlampir.

Tabel T - 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA

Lembar :

Kode	Urusan / Urusan Bidang / Program / kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode Renstra Inspektorat (tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja & Anggaran Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan penunjang								
		Urusan Bidang Pengawasan	Kapabilitas APIP (Level)	3	3.00	3.000	100.00	3	9.00	2.25
			Nilai Maturitas SPIP	3.10	3.003		101.11	3.10	9.11	2.28
			Skor IEPK (%)	3.00	2.802	2.98	94.03	3.00	8.60	2.15
			Skor MRI (%)	3.00	2.897	2.94	98.54	3.00	8.79	2.20
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	81.58	82.00	99.49	84	247.16	61.79
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	100	100	100.00	100	300	75.00
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	14	14	100.00	14	42	10.50
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah						-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	100	100	100	100.00	100	300	75.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	42	42	100.00	46	130	32.50
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	100.00	1	3	0.75
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	100.00	100	300	75.00

					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42	42	42	42	100.00	42	126	31.50
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100.00	6	18	4.50
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	26	26	26	100.00	26	78	19.50
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	24	24	24	100.00	24	72	18.00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	120	120	120	100.00	120	360	90.00
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100.00	12	36	9.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	18	18	18	100.00	18	54	13.50
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	39	39	39	100.00	39	117	29.25
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100.00	1	3	0.75
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	82	90.86	81	90.86	112.17	82	263.72	65.93
						Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	90	94.41	89	94.41	106.08	90	278.82	69.71
						Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP	75	87	60	87	145.00	75	249.00	62.25
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	48	48	48	100.00	48	144.00	36.00
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26	26	26	26	100.00	26	78.00	19.50
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	4	4	4	100.00	4	12.00	3.00
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	9.00

					Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	1	1	100.00	1	3.00	0.75
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	4	4	4	100.00	4	12.00	3.00
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	1	1	1	100.00	1	3.00	0.75
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	10	10	5	50.00	10	25.00	6.25
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP Korsupgah KPK	86	94.58	84	90.30	107.50	86	271	67.72
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	5	5	5	100.00	5	15	3.75
					Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100	100	100	100	100.00	100	300	75.00
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	7	7	7	100.00	7	21	5.25
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32	32	32	32	100.00	32	96	24.00

2.3 Rumusan permasalahan dan Isu strategis tahun 2027 berdasarkan

Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan Evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun 2025 dan kondisi lingkungan dinamis

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Analisis Keberhasilan / Kegagalan																																																																																								
1) QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3,08	2,921	94,83	Penurunan capaian QA SPIP (Sistem Pengendalian Pemerintah) tahun 2025 dengan nilai 2,921 (level 2) dimana capaian tahun 2024 Inspektorat Daerah dengan nilai 3,00 (level 3). Penurunan dari target capaian 2025 di level 2 tersebut telah menunjukkan bahwa K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Penurunan nilai QA SPIP Pemerintah Kota Salatiga perlu disikapi dengan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan SPIP Terintegrasi di Kota Salatiga, berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP di dapatkan capaian yang masih kurang pada unsur struktur dan proses serta unsur pencapaian tujuan sebagaimana dalam tabel sbb: RINCIAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA <table><tr><th>Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP</th><th>Bobot Unsur</th><th>Skor</th><th>Nilai</th></tr><tr><td colspan="4">PENETAPAN TUJUAN</td></tr><tr><td>Kualitas Sasaran Strategis</td><td>50,00%</td><td>3,000</td><td>1,500</td></tr><tr><td>Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis</td><td>50,00%</td><td>3,000</td><td>1,500</td></tr><tr><td>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</td><td>100,00%</td><td></td><td>3,000</td></tr><tr><td>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</td><td>40,00%</td><td></td><td>1,200</td></tr><tr><td colspan="4">STRUKTUR DAN PROSES</td></tr><tr><td>Lingkungan Pengendalian</td><td>30,00%</td><td>2,919</td><td>0,876</td></tr><tr><td>Penilaian Risiko</td><td>20,00%</td><td>2,883</td><td>0,576</td></tr><tr><td>Kegiatan Pengendalian</td><td>25,00%</td><td>2,795</td><td>0,698</td></tr><tr><td>Informasi dan Komunikasi</td><td>10,00%</td><td>3,000</td><td>0,300</td></tr><tr><td>Pemantauan</td><td>15,00%</td><td>2,563</td><td>0,384</td></tr><tr><td>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</td><td>100,00%</td><td></td><td>2,856</td></tr><tr><td>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</td><td>30,00%</td><td></td><td>0,856</td></tr><tr><td colspan="4">PENCAPAIAN TUJUAN</td></tr><tr><td>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</td><td>30,00%</td><td>2,67</td><td>0,800</td></tr><tr><td>Keandalan Pelaporan Keuangan</td><td>25,00%</td><td>3,000</td><td>0,750</td></tr><tr><td>Pengamanan atas Aset Negara</td><td>25,00%</td><td>3,000</td><td>0,750</td></tr><tr><td>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</td><td>20,00%</td><td>3,000</td><td>0,600</td></tr><tr><td>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</td><td>100,00%</td><td></td><td>2,900</td></tr><tr><td>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</td><td>30,00%</td><td></td><td>0,870</td></tr><tr><td>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</td><td></td><td></td><td>2,921</td></tr></table> Dalam rangka meningkatkan capaian laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran yang terlibat dalam menjadikan capaian level 2 sebagai early warning system atas pelaksanaan tata Kelola pemerintah kota salatiga yang masih perlu perbaikan <i>Area of Improvement</i> (AoI) dengan di tetapkan rencana aksi penyelesaian AoI agar capaian dapat meningkat	Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai	PENETAPAN TUJUAN				Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500	SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,000	BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,200	STRUKTUR DAN PROSES				Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,919	0,876	Penilaian Risiko	20,00%	2,883	0,576	Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,795	0,698	Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,000	0,300	Pemantauan	15,00%	2,563	0,384	SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,856	BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,856	PENCAPAIAN TUJUAN				Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	30,00%	2,67	0,800	Keandalan Pelaporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750	Pengamanan atas Aset Negara	25,00%	3,000	0,750	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	20,00%	3,000	0,600	SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,900	BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,870	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			2,921
Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai																																																																																									
PENETAPAN TUJUAN																																																																																												
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500																																																																																									
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500																																																																																									
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100,00%		3,000																																																																																									
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40,00%		1,200																																																																																									
STRUKTUR DAN PROSES																																																																																												
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,919	0,876																																																																																									
Penilaian Risiko	20,00%	2,883	0,576																																																																																									
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,795	0,698																																																																																									
Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,000	0,300																																																																																									
Pemantauan	15,00%	2,563	0,384																																																																																									
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100,00%		2,856																																																																																									
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,856																																																																																									
PENCAPAIAN TUJUAN																																																																																												
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	30,00%	2,67	0,800																																																																																									
Keandalan Pelaporan Keuangan	25,00%	3,000	0,750																																																																																									
Pengamanan atas Aset Negara	25,00%	3,000	0,750																																																																																									
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	20,00%	3,000	0,600																																																																																									
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100,00%		2,900																																																																																									
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30,00%		0,870																																																																																									
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			2,921																																																																																									

2)	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	2,98	2,910	97,65	Kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,910 (level 2) menunjukkan pemerintah Kota Salatiga sudah ada perkembangan namun masih sistem dasar yang belum kuat sehingga masih diperlukan perbaikan tata kelola pengendalian korupsi, berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian Indeks IEPK IP didapatkan capaian yang perlu ditingkatkan pada pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi sebagaimana dalam tabel sbb: Lampiran 3 Laporan : PE.09.03/LHP-843/PW11/3.2/2025 Tanggal: 24 Desember 2025 <table><tr><th colspan="4">RINCIAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA</th></tr><tr><th>PILAR-IEPK</th><th>Bobot Unsur</th><th>Skor</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</td><td>48,00%</td><td></td><td>1,440</td></tr><tr><td>Kebijakan Antikorupsi</td><td>9,60%</td><td>3,000</td><td>0,288</td></tr><tr><td>Seperangkat Sistem Antikorupsi</td><td>7,20%</td><td>3,000</td><td>0,216</td></tr><tr><td>Dukungan Sumber Daya</td><td>7,20%</td><td>3,000</td><td>0,216</td></tr><tr><td>Power (Kuasa dan Wewenang)</td><td>14,40%</td><td>3,000</td><td>0,432</td></tr><tr><td>Pembelajaran Antikorupsi</td><td>9,60%</td><td>3,000</td><td>0,288</td></tr><tr><td>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</td><td>36,00%</td><td></td><td>0,990</td></tr><tr><td>Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi</td><td>9,00%</td><td>2,000</td><td>0,180</td></tr><tr><td>Saluran Pelaporan Internal</td><td>3,60%</td><td>3,000</td><td>0,108</td></tr><tr><td>Kepemimpinan Etis</td><td>9,00%</td><td>3,000</td><td>0,270</td></tr><tr><td>Integritas Organisasional</td><td>7,20%</td><td>3,000</td><td>0,216</td></tr><tr><td>Iklim Etis Prinsip</td><td>7,20%</td><td>3,000</td><td>0,216</td></tr><tr><td>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</td><td>16,00%</td><td></td><td>0,480</td></tr><tr><td>Investigasi</td><td>8,00%</td><td>3,000</td><td>0,240</td></tr><tr><td>Tindakan Korektif</td><td>8,00%</td><td>3,000</td><td>0,240</td></tr><tr><td>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI</td><td>100%</td><td></td><td>2,910</td></tr></table> Dalam rangka meningkatkan capaian laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) diperlukan sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran yang terlibat dalam menerapkan dan menyempurnakan implementasi IEPK melalui : A. Pengelolaan risiko korupsi / FCP B. Pembentukan satgas pengelolaan risiko korupsi C. Kegiatan pembelajaran anti korupsi dilakukan secara terjadwal D. Penyempurnaan SOP dengan mencantumkan kegiatan anti korupsi	RINCIAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA				PILAR-IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440	Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,000	0,288	Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,000	0,216	Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,000	0,216	Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,000	0,432	Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,000	0,288	PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990	Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,000	0,180	Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,000	0,108	Kepemimpinan Etis	9,00%	3,000	0,270	Integritas Organisasional	7,20%	3,000	0,216	Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,000	0,216	PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480	Investigasi	8,00%	3,000	0,240	Tindakan Korektif	8,00%	3,000	0,240	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,910
RINCIAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA																																																																													
PILAR-IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai																																																																										
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440																																																																										
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	3,000	0,288																																																																										
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	3,000	0,216																																																																										
Dukungan Sumber Daya	7,20%	3,000	0,216																																																																										
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	3,000	0,432																																																																										
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	3,000	0,288																																																																										
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990																																																																										
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,000	0,180																																																																										
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,000	0,108																																																																										
Kepemimpinan Etis	9,00%	3,000	0,270																																																																										
Integritas Organisasional	7,20%	3,000	0,216																																																																										
Iklim Etis Prinsip	7,20%	3,000	0,216																																																																										
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480																																																																										
Investigasi	8,00%	3,000	0,240																																																																										
Tindakan Korektif	8,00%	3,000	0,240																																																																										
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	100%		2,910																																																																										
3)	QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	2,94	2.853	97,04%	Kurang optimalnya hasil capaian QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dengan nilai 2,853 (level 2) menunjukkan pemerintah Kota Salatiga sudah ada perkembangan namun masih sistem dasar yang belum kuat sehingga masih diperlukan perbaikan tata kelola Manajemen Risiko Indeks (MRI), berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHPP-843/PW11/3.1/2025 tanggal 24 Desember 2025 hasil penilaian komponen, unsur dan sub unsur penilaian manajemen Risiko Indeks pada area / komponen MRI yang meliputi Perencanaan, Kapabilitas dan Hasil sebagaimana dalam tabel sbb: Lampiran 2 Laporan : PE.09.03/LHP-843/PW11/3.2/2025 Tanggal: 24 Desember 2025 <table><tr><th colspan="4">RINCIAN NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA</th></tr><tr><th>AREA/KOMPONEN MRI</th><th>Bobot Unsur</th><th>Skor</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>PERENCANAAN</td><td>40,00%</td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td>Kualitas Perencanaan</td><td>40,00%</td><td>3,000</td><td>1,000</td></tr><tr><td>KAPABILITAS</td><td>30,00%</td><td></td><td>0,847</td></tr><tr><td>Kepemimpinan</td><td>5,00%</td><td>2,688</td><td>0,134</td></tr><tr><td>Kebijakan Manajemen Risiko</td><td>5,00%</td><td>3,000</td><td>0,150</td></tr><tr><td>Sumber Daya Manusia</td><td>5,00%</td><td>2,625</td><td>0,131</td></tr><tr><td>Kemitraan</td><td>2,50%</td><td>3,000</td><td>0,075</td></tr><tr><td>Proses Manajemen Risiko</td><td>12,50%</td><td>2,850</td><td>0,356</td></tr><tr><td>HASIL</td><td>30,00%</td><td></td><td>0,806</td></tr><tr><td>Aktivitas Penanganan Risiko</td><td>18,75%</td><td>2,500</td><td>0,469</td></tr><tr><td>Outcomes</td><td>11,25%</td><td>3,000</td><td>0,338</td></tr><tr><td>NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS</td><td></td><td></td><td>2,853</td></tr></table>	RINCIAN NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA				AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai	PERENCANAAN	40,00%		1,000	Kualitas Perencanaan	40,00%	3,000	1,000	KAPABILITAS	30,00%		0,847	Kepemimpinan	5,00%	2,688	0,134	Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150	Sumber Daya Manusia	5,00%	2,625	0,131	Kemitraan	2,50%	3,000	0,075	Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,850	0,356	HASIL	30,00%		0,806	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,500	0,469	Outcomes	11,25%	3,000	0,338	NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,853																
RINCIAN NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2025 PEMERINTAH KOTA SALATIGA																																																																													
AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai																																																																										
PERENCANAAN	40,00%		1,000																																																																										
Kualitas Perencanaan	40,00%	3,000	1,000																																																																										
KAPABILITAS	30,00%		0,847																																																																										
Kepemimpinan	5,00%	2,688	0,134																																																																										
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,000	0,150																																																																										
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,625	0,131																																																																										
Kemitraan	2,50%	3,000	0,075																																																																										
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,850	0,356																																																																										
HASIL	30,00%		0,806																																																																										
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	2,500	0,469																																																																										
Outcomes	11,25%	3,000	0,338																																																																										
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,853																																																																										

				disebabkan belum adanya kebijakan terkait Manajemen Risiko dan penerapan manajemen risiko belum dilakukan ke semua kemitraan yang memiliki peran penting dalam organisasi. Untuk mencapai level 3 pemerintah kota salatiga perlu memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Tercapainya nilai QA MRI sesuai dengan target nilai yang ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen jajaran APIP untuk melakukan upaya secara terus menerus guna meningkatkan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi unit pemilik risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.																													
4)	Kapabilitas APIP	3	2,34	78% Penurunan capaian Kapabilitas APIP tahun 2025 dengan nilai 2,34 (level 2) dimana capaian tahun 2024 Inspektorat Daerah dengan nilai 3,00 (level 3). Penurunan dari target capaian 2025 di level 2 (Infrastructure) tersebut menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Salatiga berada pada “Level terstruktur” dengan Skor “2,34”. Hal ini menunjukkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah mampu melaksanakan pengawasan <i>assurance</i> (penjaminan) dan <i>consulting</i> (konsultansi) dengan landasan struktur dan prosedur, namun kualitas serta konsistensi masih rendah. Penurunan capaian Kapabilitas APIP dikarenakan adanya perubahan kriteria penilaian dari BPKP yang semula ada 3 komponen, 6 elemen dan 18 topik menjadi 5 elemen dalam 23 topik sebagaimana gambar terlampir: Perbedaan Model Baru dan Lama <table><tr><th>1 Komponen</th><th>6 Elemen</th><th>18 Topik</th></tr><tr><td rowspan="6">FRAMEWORK LAMA</td><td>Pengaplikasian SDM (20%)</td><td>Pengaplikasian SDM APIP</td></tr><tr><td>Praktik Profesional (20%)</td><td>Perencanaan Pengawasan</td></tr><tr><td>Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)</td><td>Revisi Kerja Kerja dan Anggaran APIP</td></tr><tr><td>Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)</td><td>Pengembangan Komunikasi Internal APIP</td></tr><tr><td>Struktur Tata Kelola (20%)</td><td>Hubungan APIP dengan Masyarakat</td></tr><tr><td>Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)</td><td>Mekanisme Pengawasan</td></tr><tr><td rowspan="6">FRAMEWORK BARU</td><td>Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)</td><td>Perencanaan SDM APIP</td></tr><tr><td>Praktik Profesional (20%)</td><td>Program Pengawasan dan Pengukuran Kualitas</td></tr><tr><td>Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)</td><td>Struktur Pengukuran Kinerja APIP</td></tr><tr><td>Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)</td><td>Hubungan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan</td></tr><tr><td>Struktur Tata Kelola (20%)</td><td>Kelembagaan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan</td></tr><tr><td>Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)</td><td>Hubungan Pengawasan</td></tr></table>	1 Komponen	6 Elemen	18 Topik	FRAMEWORK LAMA	Pengaplikasian SDM (20%)	Pengaplikasian SDM APIP	Praktik Profesional (20%)	Perencanaan Pengawasan	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)	Revisi Kerja Kerja dan Anggaran APIP	Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)	Pengembangan Komunikasi Internal APIP	Struktur Tata Kelola (20%)	Hubungan APIP dengan Masyarakat	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Mekanisme Pengawasan	FRAMEWORK BARU	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Perencanaan SDM APIP	Praktik Profesional (20%)	Program Pengawasan dan Pengukuran Kualitas	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)	Struktur Pengukuran Kinerja APIP	Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)	Hubungan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan	Struktur Tata Kelola (20%)	Kelembagaan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Hubungan Pengawasan
1 Komponen	6 Elemen	18 Topik																															
FRAMEWORK LAMA	Pengaplikasian SDM (20%)	Pengaplikasian SDM APIP																															
	Praktik Profesional (20%)	Perencanaan Pengawasan																															
	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)	Revisi Kerja Kerja dan Anggaran APIP																															
	Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)	Pengembangan Komunikasi Internal APIP																															
	Struktur Tata Kelola (20%)	Hubungan APIP dengan Masyarakat																															
	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Mekanisme Pengawasan																															
FRAMEWORK BARU	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Perencanaan SDM APIP																															
	Praktik Profesional (20%)	Program Pengawasan dan Pengukuran Kualitas																															
	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko (20%)	Struktur Pengukuran Kinerja APIP																															
	Budaya dan Hubungan Organisasi (20%)	Hubungan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan																															
	Struktur Tata Kelola (20%)	Kelembagaan dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Peringatan																															
	Aktivitas Pengawasan (Definisi & Kualitas Pengawasan) (20%)	Hubungan Pengawasan																															

5)	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	80,35	95,65%	Penurunan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025 dengan nilai 80,35 dimana capaian tahun 2024 dengan nilai 81,58. Hasil analisis dokumen SKM Inspektorat Daerah tahun 2025, penurunan capaian disebabkan adanya indikator Prosedur (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya / Tarif (U4), Produk Layanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U8) atas hasil capaian nilai IKM tersebut perlu dilaksanakan evaluasi dan perbaikan internal dalam unsur-unsur pelayanan agar target capaian tahun 2026 dapat meningkat sesuai target yang ditetapkan
----	----------------------------	----	-------	--------	--

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga, telah dirumuskan tujuh (7) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2024	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Indikator Program Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	81	90,91	112%	Hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) internal terdiri atas penyelesaian tindak lanjut di Inspektorat Kota Salatiga (83,38%), BPKP Provinsi Jateng (89,36%) dan Inspektorat Provinsi Jawa tengah (100%). Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yaitu 81%, dengan persentase 112 %. Capaian persentase penyelesaian TLHP Internal tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 90,86% (naik 0,05) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP yang terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	89	94,74	106%	Hasil perhitungan laporan tindak lanjut BPK RI tahun 2025 adalah 94,74%. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 89% dengan persentase 106,44% Capaian persentase penyelesaian TLHP Eksternal (BPK) tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 adalah 94,41% (meningkat 0.33) karena adanya peningkatan rekomendasi atas temuan LHP BPK yang terselesaikan oleh OPD sampai dengan masa pemantauan tindak lanjut berakhir.
3	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	60	90	150 %.	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP adalah jumlah OPD yang meningkat nilai evaluasi SAKIP selama 2 tahun terakhir dibagi total OPD. Hasil perhitungan jumlah OPD meningkat nilai evaluasi SAKIP perbandingan tahun 2024 dan 2025 adalah 90%. Jumlah OPD yang naik nilai SAKIP nya adalah 28 OPD sedangkan OPD yang turun nilai SAKIP nya adalah 3 OPD dari total 31 OPD sebagai Obrik. Capaian ini telah melebihi target tahun 2024 yaitu 60%
	Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
4	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	85	90,3	106.23	Nilai MCP Korsupgah Kota Salatiga pada tahun 2025 dengan capaian 90,3 % mengalami penurunan dibandingkan hasil

N o	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Sa tu an	Targe t 2025	Real isasi 2025	Persent ase Capaian 2024	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
						capaian pada periode tahun 2024 dengan hasil capaian 94,58% dengan hasil capaian ini Kota Salatiga berada pada peringkat 61 dari 542 Instansi secara nasional dan berada dalam urutan ke 15 dari 36 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yaitu 85% dengan persentase 106,23%.
	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	80,35	97,98	Hasil Capaian Nilai SKM Inspektorat Daerah Kota Salatiga semester 1 tahun 2024 adalah 80,08 dan semester 2 tahun 2024 adalah 80,61 dimana nilai rata-rata SKM Inspektorat Salatiga tahun 2024 sebesar 80,35 % mengalami penurunan 0,97 dibandingkan capaian tahun 2024 dengan capaian 81,58. Capaian ini di bawah target tahun 2025 yaitu 82 dengan persentase 97,98 % penurunan capaian IKM tahun 2025 ini dikarenakan adanya penurunan capaian dalam indikator Prosedur (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya / Tarif (U4), Produk Layanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7) dan Sarana dan Prasarana (U8)

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi

1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;
2. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;
4. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang;
5. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani
6. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan bagi *Whistleblower System* (WBS) dan pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND);
7. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi);
8. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi;

- 10.Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan kerugian daerah
- 11.Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan Eksternal sebagai upaya pencegahan korupsi di kota salatiga;
- 12.Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi
- 13.Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi;
- 14.Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan digital;
- 15.Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik digital di inspektorat.

3. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok fungsi

1. Kurang komitmen dan pemahaman dari organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.

4. Permasalahan Inspektorat Daerah dilihat dari isu Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Masih rendahnya pengawas yang memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) karena belum semua pengawas mengikuti pelatihan pengawasan Anggaran Responsif Gender (ARG);
2. Pelaksanaan pengawasan Internal belum menyentuh pemeriksaan anggaran Responsif Gender dalam setiap penugasan pengawasan
3. Pelaksanaan pengawasan Tujuan Tertentu dan Aduan Masyarakat belum menyentuh pemeriksaan anggaran Responsif Gender dalam setiap penugasan pengawasan;

4. Kurangnya penguasaan APIP terhadap teknik penanganan Pengaduan Masyarakat yang responsif gender karena belum semua mendapatkan pelatihan investigasi dan PUG

5. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

No	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan (*Strength*)

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;

2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan;
5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Sedangkan kelemahan (*Weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan;
4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata;
5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik).

c. Peluang (Opportunities)

Sedangkan peluang (*Opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi;
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain (APIP di Inspektorat Kab/Kota lain, Inspektorat Provinsi, dan BPKP, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah;
4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi;
5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya

- sebagai pendeteksi masalah (*Watchdog*) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / (*Quality Assurance*);
6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP.

d. Tantangan (Threats)

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan;
4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data;
5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan.

7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Inspektorat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Inspektorat Daerah			Isu Strategis Inspektorat Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Belum optimalnya penguatan pengawasan Intern pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi dengan didukung SDM APIP yang kompeten	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek <i>strategis, insight & foresight</i> (AAIPI 2024)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

8. Review terhadap RKPD Tahun 2027

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Total pagu Inspektorat Daerah dalam penetapan RKPD tahun 2027 adalah Rp. 7.771.927.359,- sedangkan hasil analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan anggaran dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025 – 2029 Rp. 14.102.372.110,- mengalami penurunan sebesar Rp. 6.330.444.751,- Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 telah memperhitungkan kebutuhan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah, Perhitungan ini dengan melihat kekuatan anggaran daerah serta alokasi anggaran *Mandatory Spending* Pengawasan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 dengan klasifikasi untuk Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Persentase (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP

No	Total Belanja Daerah Kabupaten / Kota	% Anggaran Pengawasan
1.	s.d Rp. 1.000.000,000.000,-	1%
2.	Diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000.000,-	0,75%
3.	Diatas Rp. 2.000.000.000.000,-	0.50%
	Catatan : Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan	

Inspektorat Daerah Kota Salatiga selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus pada penguatan pengawasan dalam rangka pengawasan yang lebih efektif untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan strategi Perbaikan Tata Kelola Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Perencanaan total pagu belanja perangkat daerah dalam RKPD Pemerintah Kota Salatiga 2027 kebutuhan anggaran dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025 – 2029 Rp. 14.102.372.110,- mengalami penurunan sebesar Rp. 6.330.444.751,- berimplikasi juga terhadap penurunan perencanaan pagu anggaran dalam RKPD Inspektorat Daerah, dalam RKPD 2027 pagu Inspektorat Daerah sebesar Rp. 7.771.927.359,- dengan prosentase total 1% secara keseluruhan dari total belanja daerah. Dengan pembagian prosentase anggaran Gaji dan tunjangan 0,8% (Rp. 6.198.621.962) dan prosentase anggaran pengawasan 0.2% (Rp. 1.573.305.397,-). Kondisi pagu anggaran Pengawasan Inspektorat daerah di luar gaji dan tunjangan yang masih jauh dari 1% dari total APBD bagi Kabupaten / Kota dengan Belanja Daerah s.d Rp. 1.000.000,000.000,- menyebabkan Inspektorat Daerah harus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk Program dan Kegiatan prioritas yang mendukung penguatan pengawasan dalam melaksanakan Mandatory Spending Pengawasan.. yang sudah disajikan dalam Tabel 2.3 tentang reviu RENSTRA Inspektorat Daerah pada tahun 2027 dengan format terlampir.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD pada Tahun 2026

OPD : Inspektorat Daerah

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Salatiga				70,000,000.00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Salatiga				211,021,636	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%	90.15		TindakLanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%	90.15		
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%	94.15		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Salatiga	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%	94.15		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Salatiga	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	36,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Salatiga	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	180,000,000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	4,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	48	10,000,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	4,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	26	14,000,000	
	Reviu Laporan Kinerja	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	4,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	13,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Reviu Laporan Keuangan	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	7,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	12	16,000,000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Salatiga	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	10,000,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Salatiga	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	113,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	7,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	14,000,000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	34,000,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	31,021,636	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	6,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	10,000,000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	28,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	10	21,021,636	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Salatiga				287,000,000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Salatiga				1,899,997,084	
	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Salatiga	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai	94.70		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Salatiga	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai	94.70		
	Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan	Salatiga	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total	%	100		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Salatiga	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total	%	100		

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Masyarakat (DUMAS)		pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%						pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Salatiga	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100	1,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Salatiga	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100	10,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	1,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Salatiga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	5	10,000,000	
	Pendampingan dan Asistensi	Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100	286,000,000	Pendampingan dan Asistensi	Salatiga	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	100	1,889,997,084	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	90,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	478,000,000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	6,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	50,000,000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Salatiga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	kegiatan	7	165,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Salatiga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	kegiatan	7	1,281,997,084	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemberantasan Korupsi		dan Pemberantasan Korupsi				Pemberantasan Korupsi		dan Pemberantasan Korupsi				
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pera ngka t Daer ah	32	25,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Salatiga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pera ngka t Daer ah	32	80,000,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga		Pera ngka t Daer ah		7,414,927,359	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga		Pera ngka t Daer ah		11,991,353,390	
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%	100		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Salatiga	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%	100		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Salatiga	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%	81.5		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Salatiga	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%	81.5		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Salatiga	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai	78.4		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Salatiga	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai	78.4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	100	9,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	14	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	14	8,000,000	
	Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	1	-	Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	1	500,000	
	Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	1	-	Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektorat Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	1	500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100	6,241,892,480	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	100	7,737,918,410	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	46	6,097,531,994	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	46	7,430,918,410	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	144,360,486	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	307,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	18,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	25,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	18,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	25,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	235,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	545,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Salatiga	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	5,000,000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Salatiga	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Salatiga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	44	230,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Salatiga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	44	535,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	398,102,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	742,000,000	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	7,000,000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	12,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Salatiga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	18,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	62,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	18,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	29,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3,102,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	8,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	18,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	300,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	600,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	58,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2,232,492,130	
	Pengadaan Mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		-	Pengadaan Mebel	Salatiga	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		100,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	58,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	14	132,492,130	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	2,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	158,928,879	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	181,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	2,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	3,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	30,428,879	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	18,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	20,000,000	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	108,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	108,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	300,004,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	518,442,850	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	22,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	170,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	390,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	6,000,000	Pemeliharaan Mebel	Salatiga	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	9,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	50,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	60,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	25,434,850	

No	RKPD pada Tahun 2027						Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
1	2	9	4	11	12	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2,004,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	4,008,000	
						7,771,927,359						14,102,372,110	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program yang sudah tertuang dalam Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah tahun 2026 sebagai berikut:

A. Kebijakan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut diatas ditetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap perangkat daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
2. Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 memuat:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan;
 - c. pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

3. Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 9 (sembilan) aspek dan pada tahun 2026 prioritas pembinaan dan pengawasan khusus pada 4 (empat) aspek dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2026 serta mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu aspek:

1. keuangan daerah;
 2. pembangunan daerah;
 3. pelayanan publik; dan
 4. kerja sama daerah.
4. Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangan masing-masing kepada pemerintah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan teknis tahun 2026 diprioritaskan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Penataan Ruang
5. Perumahan
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
7. Sosial

5. Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional

Pembinaan dan pengawasan tematik dilakukan terhadap dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Program Strategis Nasional di daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Juni 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan
 - Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - Sekolah Rakyat
 - Pembangunan 3 Juta Rumah
2. Ketahanan Pangan
 - Mewujudkan ketahanan pangan nasional
3. Kesehatan untuk Semua
 - Jaminan Kesehatan Nasional
 - Makan Bergizi Gratis

4. Perluasan Akses Pendidikan
 - Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Pertumbuhan Ekonomi
 - Pengendalian Inflasi
 - Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat aktivitas pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. reuiu;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pemeriksaan ketaatan;
 - d. pemeriksaan kinerja;
 - e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - f. pengawasan tata kelola desa;
7. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
8. pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang merupakan kegiatan masyarakat yang diusulkan merupakan arahan Nasional yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat adalah:
 1. Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pengaduan masyarakat dan juga pengawasan tujuan tertentu.
 2. Kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dimana kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan upaya pemantauan upaya pencegahan korupsi di daerah, dimana stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dengan melibatkan seluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia.
 3. kegiatan Pengendalian Gratifikasi dengan melibatkan *stakeholder* dalam hal ini dari dunia usaha dimana Kegiatan tersebut adalah upaya mencegah korupsi di lingkup Pemerintah Kota Salatiga dalam pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar.
 4. Dalam table T-C.32.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA SALATIGA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA

NO	Program / Kegiatan / Sub	Lokas i	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Salati ga	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dumas dan TT)	10 laporan	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	100%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Salati ga	Sosialisasi Saber Pungli	1 Kegiatan	
			Kegiatan MCSP KPK	1 kegiatan	
			Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	1 Kegiatan	
			Monev UPG unit kerja	1 Kegiatan	

2.5 Inovasi bidang urusan dalam Upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Kota Salatiga terus melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan, pelayanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) baik Internal dan Eksternal juga memberikan kemudahan akses layanan pengaduan Masyarakat (Dumas), pelayanan Klinik Konsultasi APIP Sahabat Salatiga (KLIK APIP SAGA) bagi OPD Penerima layanan pengawasan maupun pelayanan lainnya.

Sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Salatiga terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Digitalisasi layanan diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam memperoleh informasi pengaduan Masyarakat yang sudah di tindak lanjuti.

No	Nama Inovasi	Manfaat Inovasi
1.	Siemon Awas (Sistem Monitoring Pengawasan)	Mengoptimalkan Sistem Monitoring Pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memonitor kekurangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara real time dan menindaklanjuti pemenuhan data dukung Eksternal dan Internalnya melalui Aplikasi Siemon Awas, sebagai upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
2.	Optimalisasi Layanan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat pada Irban Khusus Inspektorat Daerah Kota Salatiga	Pengoptimalan layanan tindak lanjut aduan masyarakat
3.	Optimalisasi Pelaksanaan Whistleblowing System (Wbs) Dalam Bentuk Pembuatan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga	Pengotimalan pelaksanaan WBS di lingkungan kota salatiga
4.	Optimalisasi Pemantauan Tindak Lanjut Kerugian Daerah Menggunakan Media Spreadsheet Dan Google Drive Di Inspektorat Daerah Kota Salatiga	Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemantauan data tindak lanjut kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
5	Proper Api Program Pemberdayaan Agen Penggerak Integritas. Upaya Meningkatkan Kinerja Inspektorat Dalam Membangun Integritas Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga	Menyediakan SDM sebagai penggerak integritas membangun budaya integritas pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. manfaatnya memberikan manfaat strategis bagi seluruh unsur Pentahelix. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun budaya integritas birokrasi sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan bebas dari KKN dan berorientasi pada Pelayanan
6	Buku Tamu	Terpantau dan terdokumentasikannya penerima layanan dari Inspektorat Salatiga dan sebagai sarana evaluasi layanan Inspektorat atas saran dan masukan yang diberikan oleh pengunjung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Penentuan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Salatiga dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang telah dimuat dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Perda No. 7 Tahun 2024).

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah: *“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”* Inspektorat Daerah Kota Salatiga melaksanakan misi pembangunan ke 3 (tiga) yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.*

Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 yang diintervensi Inspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital.

Tujuan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“meningkatkan kualitas pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas”

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Terlaksananya penguatan pengawasan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi.**
- 2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko korupsi.**

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2026-2029

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berintegritas		Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Hasil Quality Assurance BPKP atas Maturitas SPIP Kota Salatiga	Nilai	3	3	3	3,02	3,04	3,06	3,08
Peraturan Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia		Terlaksananya penguatan pengawasan dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi	Nilai Level kapabilitas APIP	Hasil Quality Assurance BPKP atas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	3,01	3,02	3,03	3,04
		Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko korupsi	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Hasil Quality Assurance BPKP atas Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Nilai	2,8	2,84	2,88	2,92	2,96	3	3

Keterangan : Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra PD tahun 2025-2029

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah pencapaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan sasaran Pemerintah Daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 yang diintervensi Inspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital maka dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan di Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah juga memberikan dukungan terhadap capaian program Nasional, NSPK, SPM dan SDGS.

Tabel 3.6

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pencapaian visi dan misi kepala daerah

N o	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

3.4.1 Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029 berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Inspektorat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi menjalankan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah;
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Mebel;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;

2. **Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Kerjasama Pengawasan Internal;
- f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

2.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;

2.2 Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan total pagu anggaran Rp 7,711,927,359,- (Tujuh milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang terbagi dalam 3 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kebutuhan dana / pagu anggaran Rp. 7.354.927.359,- (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan indikator kinerja program tahun 2026 yaitu:
 - a. Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100%;
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja 81,5%;
 - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai 78,4%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan dana / pagu anggaran Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
 - a. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1 dengan target kinerja 90,15%;
 - b. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dengan target kinerja 94,15%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan dana / pagu anggaran Rp. 287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan indikator kinerja program tahun 2027 yaitu:
 - a. Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) dengan target kinerja 94,70%;
 - b. Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dengan target kinerja 100%.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C.33 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

N o	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			salatiga		70,000,000.00	APBD			77,000,000
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%		90.15				90.20	-
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%		94.15				94.20	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	salatiga	100	36,000,000	APBD		100	39,600,000
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	48	4,000,000	APBD		48	4,400,000
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	26	4,000,000	APBD		26	4,400,000
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	salatiga	4	4,000,000	APBD		4	4,400,000
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	salatiga	12	7,000,000	APBD		12	7,700,000
	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	salatiga	1	10,000,000	APBD		1	11,000,000
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Dokumen	salatiga	4	7,000,000	APBD		4	7,700,000

N o	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	salatiga	100	34,000,000	APBD		100	37,400,000
	6.01.02.2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	salatiga	1	6,000,000	APBD		1	6,600,000
	6.01.02.2.02 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	salatiga	10	28,000,000	APBD		10	30,800,000
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			salatiga		287,000,000	APBD			315,700,000
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai		94.70				94.80	-
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%		100				100	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	salatiga	100	1,000,000	APBD		100	1,100,000
	6.01.03.2.01.000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	salatiga	5	1,000,000	APBD		5	1,100,000
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	salatiga	100	286,000,000	APBD		100	314,600,000
	6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	salatiga	32	90,000,000	APBD		32	99,000,000

No	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	salatiga	32	6,000,000	APBD		32	6,600,000
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	salatiga	7	165,000,000	APBD		7	181,500,000
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	salatiga	32	25,000,000	APBD		32	27,500,000
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Perangkat Daerah	salatiga		7,354,927,359	APBD			8,090,420,095
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintahan yang terlaksana di bagi jumlah kegiatan pendukung urusan pemerintah di kali 100%	%		100				100	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 & 2 dibagi jumlah semester penyusunan IKM di kali 100%	%		81.5				81.8	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP tahun N-1	Nilai		78.4				78.6	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%	salatiga	100	5,000,000	APBD		100	5,500,000
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	salatiga	14	5,000,000	APBD		14	5,500,000
		Pelaksanaannya pengumpulan data Statistik Sektorat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorat Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Inspektorat Daerah	Data	salatiga	1		APBD		1	-

No	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan Walidaya pendukung statistik	Dokumen	salatiga	1		APBD		1	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	%	salatiga	100	6,241,892,480	APBD		100	6,866,081,728
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	salatiga	44	6,097,531,994	APBD		46	6,707,285,193
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	salatiga	1	144,360,486	APBD		1	158,796,535
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	salatiga	100	18,000,000	APBD		100	19,800,000
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	salatiga	1	18,000,000	APBD		1	19,800,000
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	salatiga	100	235,000,000	APBD		100	258,500,000
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	salatiga	1	5,000,000	APBD		1	5,500,000
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	salatiga	46	230,000,000	APBD		48	253,000,000
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	salatiga	100	398,102,000	APBD		100	437,912,200
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	salatiga	2	7,000,000	APBD		2	7,700,000
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	salatiga	4	12,000,000	APBD		4	13,200,000

No	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	salatiga	14	50,000,000	APBD		14	55,000,000
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	salatiga	14	18,000,000	APBD		14	19,800,000
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	salatiga	12	3,102,000	APBD		12	3,412,200
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	salatiga	36	8,000,000	APBD		36	8,800,000
	6.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	salatiga	100	300,000,000	APBD		100	330,000,000
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	salatiga	100	58,000,000	APBD		100	63,800,000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	salatiga			APBD			
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	salatiga		58,000,000	APBD		20	63,800,000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	salatiga	1	-	APBD		1	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	salatiga	100	158,928,879	APBD		100	174,821,767
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	salatiga	12	2,500,000	APBD		12	2,750,000
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	salatiga	12	30,428,879	APBD		12	33,471,767
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	salatiga	12	18,000,000	APBD		12	19,800,000

N o	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		laporan	salatiga	12	108,000,000	APBD			118,800,000
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	salatiga	100	240,004,000	APBD		100	264,004,400
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	salatiga	1	22,000,000	APBD		1	24,200,000
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	salatiga	18	170,000,000	APBD		18	187,000,000
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	salatiga	3	6,000,000	APBD		3	6,600,000
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	salatiga	40	40,000,000	APBD		40	44,000,000
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	salatiga	1	-	APBD		1	-
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	salatiga	2	2,004,000	APBD		2	2,204,400
		TOTAL PAGU ANGGARAN					7,711,927,359				8,483,120,095

4.2 Rencana Kerja Program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target Nasional dan Program Strategis Nasional (ProSN)

Dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) tahun 2026 yang meliputi 8 (delapan) aspek yaitu : Ketahanan pangan, Ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan desa, koperasi & UMKM, Pertahanan dan Akselerasi investasi & perdagangan global dan dalam rangka mewujudkan rencana kerja program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia dengan indikator kinerja yaitu : angka kemiskinan, PDRB perkapita, Indeks Reformasi Birokrasi, penurunan emisi GRK Kumulatif dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Dalam mendukung program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target Nasional dan Program Strategis Nasional (ProSN) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan dan pendampingan pelaksanaan Program prioritas daerah dan program Strategis Nasional (ProSN) agar berjalan efektif dan tepat sasaran telah di tuangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2026 yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor : 700/519/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, dimana peran APIP adalah sebagai berikut

- **Pengawalan dan Pengawasan**

Memastikan setiap target, anggaran, dan alur program prioritas daerah dan Program Strategis Nasional (ProSN) di daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- **Penjaminan Kualitas dan Reviu**

Melakukan *quality assurance* serta reviu data capaian program agar pelaporan pemantauan (*Monitoring*) terlaksana dengan akurat.

- **Mitigasi Risiko dan Deteksi Dini**

Berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah masalah pemborosan, inefisiensi, atau potensi korupsi sejak tahap perencanaan.

- **Pendampingan dan Konsultasi**

Memberikan saran dan solusi perbaikan tata kelola bagi perangkat daerah agar pelaksanaan program strategis tidak melanggar hukum.

Tabel 4.1
Anggaran Pengawasan APIP pendukung pencapaian
Program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target Nasional dan Program Strategis Nasional (ProSN)

No	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan			salatiga		70,000,000.00	APBD			77,000,000
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pengawasan internal yang selesai di tindak lanjuti (pengawasan inspektorat +Itprov Jateng + BPKP) di bagi jumlah total rekomendasi pengawasan internal di kali 100%	%		90.15				90.20	-
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi BPK RI dikali 100%	%		94.15				94.20	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	salatiga	100	36,000,000	APBD		100	39,600,000
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	48	4,000,000	APBD		48	4,400,000
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	salatiga	26	4,000,000	APBD		26	4,400,000
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	salatiga	4	4,000,000	APBD		4	4,400,000
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	salatiga	12	7,000,000	APBD		12	7,700,000
	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	salatiga	1	10,000,000	APBD		1	11,000,000

N o	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana	
					2027					Tahun 2028	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	salatiga	4	7,000,000	APBD		4	7,700,000
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	salatiga	100	34,000,000	APBD		100	37,400,000
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	salatiga	1	6,000,000	APBD		1	6,600,000
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	salatiga	10	28,000,000	APBD		10	30,800,000
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			salatiga		287,000,000	APBD			315,700,000
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Hasil Quality Assurance KPK atas Nilai MCSP Kota Salatiga	Nilai		94.70				94.80	-
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	Jumlah penyelesaian pemeriksaan pengaduan masyarakat (DUMAS) dibagi jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk di kali 100%	%		100				100	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	salatiga	100	1,000,000	APBD		100	1,100,000
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	salatiga	5	1,000,000	APBD		5	1,100,000
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi	%	salatiga	100	286,000,000	APBD		100	314,600,000

[illegible]

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2027

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 5.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN										
1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Nilai	3.003	3.023	3.043	3.063	3.083	3.100	3.100	
SASARAN										
2	Nilai Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
3.	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Nilai	2,802	2,842	2,882	2,922	2,962	3	3	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 5.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada tahun 2025 – 2029 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama pada tingkat tujuan dan 2 (dua) indikator kinerja utama pada tingkat sasaran.

5.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2027

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Nilai	3,003	3,023	3,043	3,063	3,083	3,100	3,100	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 5.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil (*outcome*) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel 5.3
Penetapan Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90	90,1	90,15	90,2	90,25	90,3	90,3	
2	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,1	94,15	94,2	94,25	94,3	94,3	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi										
3	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai	94	94,6	94,7	94,8	94,9	95	95	
4	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
5	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81	81,4	81,5	81,8	82	82,5	82,5	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	79	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 5.3 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga memiliki 7 (tujuh) indikator program dari 3 program yang ada, yang nantinya akan mendukung sasaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam RPJMD tahun 2025-2029 yaitu “*meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima*”.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2025), tahun berjalan (2026) dan tahun selanjutnya (2028) agar pelaksanaannya dapat terus dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Salatiga perlu memberikan dukungan dalam memperkuat peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 4 (empat) elemen yaitu : Kelembagaan APIP, Anggaran APIP, Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dan Fokus Pengawasan.

Perlunya strategi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 agar bisa mendapatkan capaian hasil yang optimal, diperlukan sinergi dan evaluasi perbaikan setiap elemen indikator dan kriteria yang dilaksanakan dalam setiap tahapannya.

Alokasi anggaran pengawasan yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kota Salatiga juga memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran di Pemerintah Kota Salatiga dengan optimalisasi anggaran namun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah tetap dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 yang perlu diatur sebagai berikut :

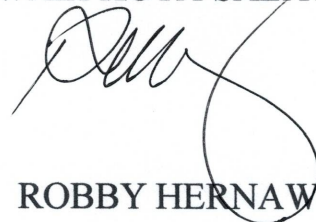
1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah menpedomani Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2025-2029, yang dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perlu disusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan memuat tindak lanjut atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam segi penanggung jawab, operasionalisasi kegiatan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

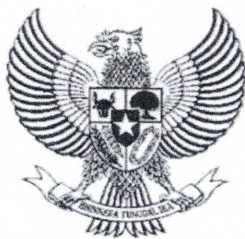
WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

Lampiran

SK RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.



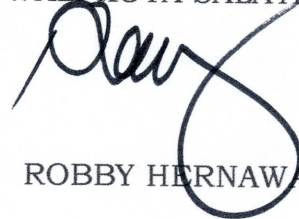
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



Lampiran

SK RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2027



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Cemara No. 38 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325518
Fax. (0298) 325518 Situs <https://irda.salatiga.go.id>
Surat Elektronik irda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SALATIGA

NOMOR : 700/30/300/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026**

INSPEKTUR KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
28. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) perubahan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. menyiapkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab pada Wali Kota.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 1 Juli 2026



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRANKEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/10/300/2026
TANGGAL : 11 februari 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2027

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah	Anggota
9.	P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
10.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
11.	P2UPD Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
12.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Staf pada Inspektorat Daerah	Anggota



INSPEKTUR KOTA SALATIGA

Drs. MUTHOIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901091990011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR :
700/10/300/2026
TANGGAL : 11 februari 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2027

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)	Desember 2025
2.	Input Renja pada Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD)	30 Januari-4 Februari 2026
3.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2026	Minggu ke-II bulan Februari
4.	Desk Penajaman Renja PD Tahun 2026	Minggu ke-III s.d Minggu ke-IV bulan Februari 2026
5.	Musrenbang RKPD Tahun 2026	Minggu ke-II bulan Maret 2026
6.	Desk Finalisasi Renja PD Tahun 2026	Minggu ke-III s.d Minggu ke-IV bulan Maret 2026

INSPEKTUR KOTA SALATIGA



Drs. MUTHOIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196901091990011002

Lampiran

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
RENCANA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
2027 DENGAN LAMPIRAN
FORMULIR E 70**

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah, dengan hasil sebagai berikut :

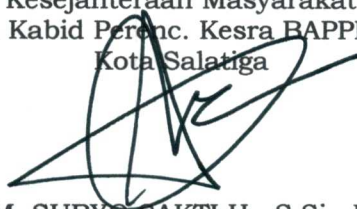
- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 14 Tahun 2026, paling sedikit memuat 6 (enam) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 6. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Plt. Inspektur Kota Salatiga
Sekretaris Inspektorat Daerah,



SITI ANDJAJANAH, SH., MH
NIP. 19690630 199603 2 003

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Plh. Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



R.M. SURYO SAKTI H., S.Si., MH
NIP. 19750516 200112 1 001

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Inspektorat Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			ada pada lampiran
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika RENJA 2027
Inspektorat - Kota Salatiga

Sistematika	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			
		Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan	
		Ada	Tidak		
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2027 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V		
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	V		sesuaiakan menjadi 6 bab
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU					
II.1	Evaluasi Capaian Kinerja	Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
II.2	Evaluasi Capaian SPM	Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)	V		Inspektorat tidak mempunyai SPM
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis	Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
II.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V		
II.5	Usulan Masyarakat	Telaah Usulan Masyarakat	V		
II.6	Inovasi	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	V		
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
III.2	Arah Kebijakan	Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya	V		
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
IV.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan	V		

1

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
IV.2	Tematik	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah)		V	belum ada dukungan tematik
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
V.1	Indikator Kinerja Utama PD	Target keberhasilan pencapaian yang didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		
V.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		
BAB VI PENUTUP					
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah	V		ttd wali kota

4

Lampiran

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH
(RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2027**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Inspektorat						7.780.927.359,00								8.559.020.093,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						7.780.927.359,00								8.559.020.093,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						7.780.927.359,00								8.559.020.093,00	
160.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.420.927.359,00								8.163.020.093,00	
			-	-		-	-	7.329.927.359,00							-	8.062.920.093,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
		-						5.000.000,00						-		5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	14 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.892.480,00						-		6.875.981.727,00	
		-						6.250.892.480,00						-		6.875.981.727,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	153.360.486,00							-	168.696.534,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.097.531.994,00							-	6.707.285.193,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.097.531.994,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			6.707.285.193,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	46 Orang/bulan	6.097.531.994,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.707.285.193,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						153.360.486,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			168.696.534,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	153.360.486,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	168.696.534,00	Inspektorat
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.000.000,00						-		19.800.000,00	
		-						18.000.000,00						-		19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	18.000.000,00							-	19.800.000,00	
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						18.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			19.800.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.800.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						235.000.000,00						-		258.500.000,00	
		-						235.000.000,00						-		258.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	230.000.000,00							-	253.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			5.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.500.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						230.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			253.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	46 Orang	230.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	253.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						398.102.000,00						-		437.912.200,00	
		-						398.102.000,00						-		437.912.200,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.102.000,00							-	3.412.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	8.000.000,00							-	8.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00							-	330.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedlakan	-		-	-	18.000.000,00							-	19.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedlakan	-		-	-	7.000.000,00							-	7.700.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedlakan	-		-	-	12.000.000,00							-	13.200.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyedlaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerinta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			7.700.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedlakan	-		-	2 Paket	7.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.700.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0003	Penyedlaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerinta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			13.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedlakan	-		-	4 Paket	12.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	13.200.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.06.0004	Penyedlaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerInta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			55.000.000,00	
		Tersedlanya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedlakan	-		-	14 Paket	50.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0005	Penyedlaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerInta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			19.800.000,00	
		Tersedlanya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedlakan	-		-	14 Paket	18.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.800.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0006	Penyedlaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.102.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerInta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			3.412.200,00	
		Tersedlanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedlakan	-		-	12 Dokumen	3.102.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.412.200,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu						8.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			8.800.000,00	
		Tertaksananya Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	-		-	36 Laporan	8.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	8.800.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			330.000.000,00	
		Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	300.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	330.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00							-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	14 Unit	50.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	55.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.928.879,00						-		174.821.766,00	
		-						158.928.879,00						-		174.821.766,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	30.428.879,00							-	33.471.766,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	108.000.000,00							-	118.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.000.000,00							-	19.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.500.000,00							-	2.750.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			2.750.000,00	
		Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.750.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.08.0002	Penyedlaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.428.879,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerinta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			33.471.766,00	
		Tersedlanya Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedlakan	-		-	12 Laporan	30.428.879,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.471.766,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0003	Penyedlaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerinta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			19.800.000,00	
		Tersedlanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedlakan	-		-	12 Laporan	18.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.800.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0004	Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						108.000.000,00			-	-	u. Mengem bangkan riset dan Inovasi dalam peny elenggaraa n pemerinta han dan pe mbangunan daerah yang mampu me ningkatkan daya saling dan kesejah teraan masyarakat.			118.800.000,00	
		Tersedlanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedlakan	-		-	12 Laporan	108.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	118.800.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						305.004.000,00						-		335.504.400,00	
		-						305.004.000,00						-		335.504.400,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	60.000.000,00							-	66.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertolannya	-		-	-	170.000.000,00							-	187.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	22.000.000,00							-	24.200.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00							-	6.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	45.000.000,00							-	49.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.004.000,00							-	2.204.400,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			24.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	22.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.200.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						170.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			187.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertzinannya	-		-	18 Unit	170.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	187.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						6.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			6.600.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	2 Unit	6.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.600.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			49.500.000,00	
		Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	40 Unit	45.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	49.500.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						60.000.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			66.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	60.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	66.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.004.000,00			-	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			2.204.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.004.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.204.400,00	Inspektorat
161.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						114.000.000,00								125.400.000,00	
			TindakLanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	-		-	94.15 %	99.000.000,00							-	108.900.000,00	
			TindakLanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	-		-	90.15 %	65.000.000,00							-	71.500.000,00	
			TindakLanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	-		-	90.15 %	34.000.000,00							-	37.400.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						80.000.000,00						Seluruh OPD di Kota Salatiga		88.000.000,00	
		-						80.000.000,00						Seluruh OPD di Kota Salatiga		88.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	7.000.000,00							-	7.700.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	54.000.000,00							-	59.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	4.000.000,00							-	4.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	4.000.000,00							-	4.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Revlue Laporan Keuangan	-		-	-	7.000.000,00							-	7.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Revlue Laporan Kinerja	-		-	-	4.000.000,00							-	4.400.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			4.400.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	48 Laporan	4.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.400.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			4.400.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	26 Laporan	4.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.400.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.02.2.01.0003	Revlu Laporan Kinerja						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan teraan masyarakat.			4.400.000,00	
		Tertaksananya Revlu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revlu Laporan Kinerja	-		-	4 Laporan	4.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.400.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0004	Revlu Laporan Keuangan						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan teraan masyarakat.			7.700.000,00	
		Tertaksananya Revlu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revlu Laporan Keuangan	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.700.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						54.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan teraan masyarakat.			59.400.000,00	
		Tertaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	1 Kesepakatan	54.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	59.400.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			7.700.000,00	
		Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	4 Dokumen	7.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	7.700.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						34.000.000,00						Seluruh OPD dan Masyarakat di Kota Salatiga		37.400.000,00	
		-						34.000.000,00						Seluruh OPD dan Masyarakat di Kota Salatiga		37.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	28.000.000,00							-	30.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	6.000.000,00							-	6.600.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						6.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			6.600.000,00	
		TertanganInya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.600.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						28.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			30.800.000,00	
		Tertaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	10 Laporan	28.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.800.000,00	Inspektorat
162.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						246.000.000,00								270.600.000,00	
			Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	-		-	94,7 Nilai	246.000.000,00							-	270.600.000,00	
			Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	-		-	100 %	1.000.000,00							-	1.100.000,00	
			Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	-		-	100 %	245.000.000,00							-	269.500.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan						1.000.000,00						Inspektorat dan Seluruh OPD di Kota Salatiga		1.100.000,00	
		-						1.000.000,00						Inspektorat dan Seluruh OPD di Kota Salatiga		1.100.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	1.000.000,00							-	1.100.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	5 Rekomendasi	1.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.100.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						245.000.000,00						Inspektorat, Seluruh OPD dan Masyarakat di Kota Salatiga		269.500.000,00	
		-						245.000.000,00						Inspektorat, Seluruh OPD dan Masyarakat di Kota Salatiga		269.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	120.000.000,00							-	132.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	25.000.000,00							-	27.500.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	10.000.000,00							-	11.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	90.000.000,00							-	99.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			99.000.000,00	
		Tertaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	32 perangkat daerah	90.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	99.000.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			11.000.000,00	
		Tertaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	32 perangkat daerah	10.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						120.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			132.000.000,00	
		Tertaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	7 Kegiatan	120.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	132.000.000,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						25.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	u. Mengembangkan riset dan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saling dan kesejahteraan masyarakat.			27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tertaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	32 perangkat daerah	25.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	Inspektorat

**PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH
RKPD 2027**



No	Perangkat Daerah	BELANJA RUTIN BERDASARKAN RAPBD 2026				
		SUBKEG GAJI	P3K / THL / Tng Adm	Pajak Kendaraan	BBM Kendaraan	Telp Air Listrik
1	Dinas Pendidikan	98.737.694.230	5.497.875.110	20.294.000	26.485.500	230.000.000
2	Dinas Kesehatan	83.498.801.990	585.257.673	99.950.000	207.499.200	330.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Pe	5.890.609.628	1.010.498.868	63.750.000	301.087.500	110.689.500
4	Dinas Perumahan dan Kawasan	5.120.333.803	1.383.336.318	15.500.000	124.510.400	114.850.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.131.469.160	2.715.706.200	46.300.000	308.564.000	44.626.000
6	Badan Penanggulangan Bencar	1.687.068.287		16.400.000	37.425.000	22.010.000
7	Dinas Sosial	4.284.279.885	319.231.458	16.850.000	69.231.900	61.200.000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan	5.013.760.445	481.225.527	37.000.000	115.774.000	110.000.000
9	Dinas Pangan dan Pertanian	7.620.829.660	879.153.301	23.400.000	87.530.000	83.187.750
10	Dinas Lingkungan Hidup	11.104.736.080	7.088.421.914	126.100.000	1.693.118.622	901.904.000
11	Dinas Kependudukan dan Penc	3.959.814.664	390.171.782	13.500.000	77.292.000	123.040.000
12	Dinas Perhubungan	6.244.877.641	486.447.936	32.090.000	115.939.100	102.544.000
13	Dinas Komunikasi dan Informat	6.150.009.484	447.771.782	10.000.000	43.231.400	105.000.000
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, da	3.172.298.854	106.410.486	11.400.000	89.017.500	20.000.000
15	Dinas Penanaman Modal dan P	3.118.393.788	243.223.968	8.500.000	51.195.500	96.012.450
16	Dinas Kepemudaan dan Olah R	3.783.257.767	283.761.296	17.800.000	88.131.600	150.000.000
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwis	3.134.779.432	319.231.458	-	40.964.999	44.522.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kears	4.590.633.260	329.365.790	16.400.000	94.543.675	136.476.000
19	Dinas Perdagangan	7.106.778.000	2.283.014.214	23.500.000	104.271.900	349.769.150
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga	3.775.191.865	141.880.648	13.500.000	52.469.300	100.000.000
21	Sekretariat Daerah	18.570.508.403	1.962.521.582	80.000.000	509.362.000	952.968.500
22	Sekretariat DPRD	3.650.682.610	87.740.324	26.700.000	295.850.000	450.000.000
23	Badan Perencanaan, Penelitian	4.553.402.764	248.291.134	6.400.000	77.612.500	46.000.000
24	Badan Pengelolaan Keuangan d	16.902.567.228	532.052.430	22.000.000	103.559.200	175.000.000
25	Badan Kepegawaian dan Penge	5.760.189.722	248.291.134	7.100.000	73.540.000	90.000.000
26	Inspektorat	6.097.531.994	101.089.968	17.800.000	129.129.800	48.744.663
27	Kecamatan Argomulyo	7.843.467.158	182.417.976	20.600.000	54.952.900	60.000.000
28	Kecamatan Sidomukti	6.543.344.490	177.350.810	7.558.400	51.462.600	105.408.000
29	Kecamatan Sidorejo	8.072.253.720	428.175.527	17.607.000	65.482.500	75.000.000
30	Kecamatan Tingkir	10.260.472.171	456.044.940	26.500.000	77.310.000	85.175.000
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Pe	4.536.185.322	70.940.324	23.500.000	84.288.900	45.668.000
JUMLAH		366.916.223.505	29.486.901.878	867.999.400	5.250.833.496	5.369.795.013

**PAGU INDIKATIF
PERANGKAT DAERAH
RKPD 2027**



No	Perangkat Daerah	Belanja Lain		OPSEN	Retribusi Daerah	Pendapatan BLUD	DBH CHT	DBH SDA	TOTAL
									PAGU 2027
1	Dinas Pendidikan								105.503.450.231
2	Dinas Kesehatan	23.000.000.000	JKN	13.408.093.500	163.725.187.315	2.930.250.085	5.600.000.000		293.880.590.459
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Pe			1.600.000.000					22.752.944.837
4	Dinas Perumahan dan Kawasa								19.147.297.914
5	Satuan Polisi Pamong Praja						540.000.000		11.322.872.517
6	Badan Penanggulangan Bencar								2.754.004.678
7	Dinas Sosial						700.000.000		6.441.894.634
8	Dinas Pemberdayaan Perempu								7.343.522.198
9	Dinas Pangan dan Pertanian						300.000.000	247.255.000	10.232.457.102
10	Dinas Lingkungan Hidup			180.000.000				173.141.000	23.249.624.399
11	Dinas Kependudukan dan Penc								5.108.924.211
12	Dinas Perhubungan	9.000.000.000	LPJU	1.850.000.000					18.803.178.041
13	Dinas Komunikasi dan Informat	3.200.000.000	Internet				50.000.000		10.303.343.083
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, da						300.000.000		5.582.219.484
15	Dinas Penanaman Modal dan P								4.012.876.402
16	Dinas Kepemudaan dan Olah R						50.000.000		17.257.268.752
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwis						50.000.000		5.274.370.254
18	Dinas Perpustakaan dan Kears								6.356.740.395
19	Dinas Perdagangan						200.000.000		11.058.434.655
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga						1.000.000.000		6.074.143.204
21	Sekretariat Daerah	885.050.000	gaji KDH				210.000.000		32.110.145.036
22	Sekretariat DPRD	16.132.500.000	gaji DPRD						35.262.218.458
23	Badan Perencanaan, Penelitian								6.121.028.068
24	Badan Pengelolaan Keuangan d	3.000.000.000	BTT						24.778.872.535
25	Badan Kepegawaian dan Penge								8.656.874.335
26	Inspektorat								7.771.927.359
27	Kecamatan Argomulyo	4.090.750.000	DAKEL						13.768.573.163
28	Kecamatan Sidomukti	2.830.500.000	DAKEL						11.400.496.665
29	Kecamatan Sidorejo	4.083.000.000	DAKEL						14.129.060.695
30	Kecamatan Tingkir	3.926.500.000	DAKEL						16.368.209.268
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Pe								7.436.556.303
	JUMLAH	70.148.300.000		17.038.093.500	163.725.187.315	2.930.250.085	9.000.000.000	420.396.000	770.264.119.337